

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Aziz, Nyimas Latifah Letty dan Zuhro, R. Siti, 2017, *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana
- Munir, Sirojul, 2013, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Rasyid, Hamatar, 2017, *Pengantar Ilmu Politik: Dalam Perspektif Barat dan Islam*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Subarno, Hari, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta
- Sulaiman, King Faisal, 2014, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah pasca Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Wahidin, Samsul, 2014, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Yusnani, dkk., 2017, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Rajawali Pers

JURNAL:

- Abdullah, Dudung, Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 1, Desember 2016
- Arthanaya, I Wayan, Otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *Kertha Wicaksana*, Volume 17, Nomor 2, Juli 2011
- Idami, Zahratul, Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Setelah Adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 63, Agustus 2014

- Jati, Wasisto Raharjo, Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012
- Manan, Firman, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov*, Vol. 1, No. 1, April 2015
- Nasarudin, Tubagus Muhammad, Peran DPD Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (UUD 1945 Pasca Amandemen), *Fiat Justisia Journal of Law*, Vol. 10 No. 1, Januari-Maret 2016
- Pasaribu, Parlindungan, 2010, Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *YURISKA*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2010
- Rossevelt, Franklin Asido, dkk., 2014, Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan APBD di Kota Malangi, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 3
- Ulya, Zaki, Kontradiksi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Ditinjau Dari Segi Kemandirian Lembaga Dalam Sistem Bikameral, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11 No. 2, Juli-Desember 2016
- Warouw, Shinta, dkk., Analisis Penggunaan Dana Otonomi Khusus pada Pemerintah Kota Sorong di Provinsi Papua Barat, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16, No. 01, Tahun 2016
- Wibisono, Yusuf, Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Rangka Proses Demokratisasi di Tingkat Lokal, *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 40, No. 56, Mei 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Permusyawaratan Papua

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa